

Analisis Korelasi Antara Kesejahteraan Ekonomi dan Keamanan Nasional Dalam Konteks Strategi Nasional

Imam Ghozali^{1*}, Vicky Chandra², Faiza Ayrul³, Indah Rachma⁴, Niken Ayu⁵, Amelia Nur⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

*Corresponding Author: imamgh284@gmail.com

Abstract: *In recent decades, countries have faced significant challenges involving economic instability and increasingly complex security threats. Threats to security can disrupt economic activity, and trigger instability that inhibits economic growth and vice versa. This research aims to analyze the reciprocal relationship between economic well-being and national security in the context of national strategy. Through a literature study approach, this research collects and analyzes relevant sources on economic welfare, national security, and the context of national strategy. The results of this study reveal that increased economic prosperity can also improve people's welfare, thereby strengthening national security. Likewise, secure national security can enable more stable and sustainable economic development. Therefore, there is a need for policies that are integrated with national strategies, such as policies with security strategies, policies with economic strategies, and policies with welfare strategies to ensure the realization of national interests.*

Keywords: *Security, Welfare, National Strategy*

Abstrak: Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara menghadapi tantangan signifikan yang melibatkan ketidakstabilan ekonomi dan ancaman keamanan yang semakin kompleks. Ancaman terhadap keamanan dapat mengganggu kegiatan ekonomi, dan memicu ketidakstabilan yang menghambat pertumbuhan ekonomi begitupun sebaliknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan timbal balik antara kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional dalam konteks strategi nasional. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber yang relevan mengenai kesejahteraan ekonomi, keamanan nasional, dan konteks strategi nasional. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kesejahteraan ekonomi yang meningkat dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat keamanan nasional. Begitupun sebaliknya, keamanan nasional yang terjamin dapat memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukannya kebijakan yang padu dengan dan strategi nasional, seperti kebijakan dengan strategi keamanan, kebijakan dengan strategi ekonomi, serta kebijakan dengan strategi kesejahteraan untuk menjamin terwujudnya kepentingan nasional

Kata kunci: Keamanan, Kesejahteraan, Strategi Nasional

PENDAHULUAN

Kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional merupakan dua komponen vital yang saling berkaitan dan berperan krusial dalam menentukan stabilitas serta kemajuan suatu negara. Kesejahteraan ekonomi mencakup aspek-aspek seperti pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan yang adil, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup. Semua ini berkontribusi pada stabilitas sosial dan politik, yang pada gilirannya mempengaruhi keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan nasional, yang mencakup perlindungan dari ancaman internal dan eksternal seperti terorisme, konflik bersenjata, dan kejahatan transnasional, memiliki dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Ancaman terhadap keamanan dapat mengganggu kegiatan ekonomi, mengurangi investasi, dan memicu ketidakstabilan yang menghambat pertumbuhan.

Penelitian ini, berjudul "Analisis Korelasi antara Kesejahteraan Ekonomi dan Keamanan Nasional dalam Konteks Strategi Nasional," bertujuan untuk menginvestigasi hubungan timbal balik antara kedua variabel tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah

untuk memahami bagaimana kesejahteraan ekonomi mempengaruhi keamanan nasional dan sebaliknya, serta bagaimana strategi nasional dapat dioptimalkan untuk mengintegrasikan keduanya secara efektif.

Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai negara menghadapi tantangan signifikan yang melibatkan ketidakstabilan ekonomi dan ancaman keamanan yang semakin kompleks. Krisis ekonomi global, peningkatan kesenjangan pendapatan, serta ancaman terorisme dan serangan siber telah memperlihatkan bagaimana ketidakstabilan dalam satu area dapat mempengaruhi dan memperburuk kondisi di area lain. Misalnya, krisis ekonomi sering kali meningkatkan kerentanan terhadap kejahatan dan ketidakstabilan politik, sementara ancaman keamanan dapat menghalangi investasi dan merusak pertumbuhan ekonomi.

Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola korelasi antara indikator-indikator ekonomi dan keamanan, serta memahami bagaimana interaksi antara keduanya dapat mempengaruhi kebijakan nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam bagi para pembuat kebijakan mengenai pentingnya mempertimbangkan dampak timbal balik antara kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional dalam perencanaan dan implementasi strategi nasional.

Lebih jauh lagi, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam bidang studi keamanan dan ekonomi. Temuan-temuan yang dihasilkan diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi nasional yang lebih komprehensif dan adaptif, yang tidak hanya berfokus pada satu aspek, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap aspek lainnya. Dengan pendekatan yang lebih terpadu, diharapkan negara dapat mencapai stabilitas dan kemakmuran yang lebih berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas hidup warganya secara keseluruhan.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memfasilitasi dialog dan diskusi lebih lanjut tentang pentingnya integrasi antara kebijakan ekonomi dan keamanan dalam konteks global yang terus berubah. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional, negara-negara dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan serta stabilitas jangka panjang.

METODE

Metode kualitatif studi literatur adalah metode yang digunakan untuk penelitian ini. (Sugiyono, 2014) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metodologi penelitian deskriptif yang menggunakan analisis, membuat referensi ke fakta, menarik dukungan dari teori, dan mengembangkan teori. Sementara itu, studi literatur, menurut Habsy (2017), seberapa baik mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman tentang komunikasi secara matematis ke dalam konten yang esensial. Proses pengumpulan data dari berbagai bahan pendukung, termasuk buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah, dan sumber informasi terkait lainnya tentang subjek yang diteliti, dikenal sebagai studi literatur.

Metode penulis dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini melibatkan pengumpulan dan penyusunan berbagai jenis informasi dari sumber-sumber literatur yang relevan dengan subjek, menganalisis bagaimana materi tersebut berkaitan satu sama lain, dan merangkum semuanya menjadi satu artikel. Informasi yang dikumpulkan dari literatur akan diperiksa untuk menemukan kecenderungan hubungan antara variabel keamanan dan ekonomi. Untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh mengenai hubungan antara keberhasilan ekonomi dan keamanan nasional dalam kerangka strategi nasional, analisis ini dilakukan dengan cara yang kontekstual dan terperinci. Langkah selanjutnya adalah menggunakan hasil analisis data untuk membuat kesimpulan yang menjawab topik studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis korelasi antara kesejahteraan ekonomi dan keamanan nasional dalam konteks strategi nasional Indonesia menunjukkan bahwa keduanya saling terkait dan memerlukan implementasi kebijaksanaan yang terpadu. Kesejahteraan ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat keamanan nasional, sedangkan keamanan nasional yang terjamin dapat memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Sebagai fungsi pemerintahan negara, bela negara berfungsi untuk mempertahankan keutuhan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Semua upaya pertahanan semesta, yang pelaksanaannya didasarkan pada pengetahuan warga negara akan hak dan tanggung jawabnya serta keyakinan akan kekuatan sendiri, pada hakikatnya merupakan bela negara Republik Indonesia.

Dalam rangka mempertahankan kedaulatan, pertahanan negara diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut. Sistem ini dikenal dengan istilah pertahanan semesta, yang meliputi seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem ini juga direncanakan sebelumnya oleh pemerintah. bangsa, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pasal 26, 27, 28, dan 30 UUD 1945 mencantumkan hal-hal berikut sebagai hak dan kewajiban:

1. Pasal 26, ayat (1), yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat (2), syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
2. Pasal 27, ayat (1), segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat (2), tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.
4. Pasal 30, ayat (1), hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat (2) menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang.

Kesejahteraan Ekonomi adalah sumber kekuatan nasional, karena tanpa keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi, atau variasinya, telah dibahas selama beberapa dekade namun globalisasi ekonomi telah menjadikannya isu yang lebih mendesak. Ada yang berpendapat bahwa kesejahteraan ekonomi bukan hanya perlindungan kepentingan nasional tetapi juga kesiapan dan kemampuan lembaga pemerintah dalam menumbuhkan perekonomian nasional; pihak lain memperluas pandangan ini dengan mencakup tidak adanya ancaman yang dapat membahayakan stabilitas dan kemandirian ekonomi.

Kesejahteraan ekonomi Indonesia mencakup aspek kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar, serta memperkuat wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berorientasi pada aspek kesejahteraan dan keamanan. Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Kesejahteraan ekonomi dalam konteks strategi nasional merujuk pada kemakmuran ekonomi suatu negara sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan strategis nasional. Ini mencakup berbagai aspek ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang adil, stabilitas harga, dan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks strategi nasional, kesejahteraan ekonomi menjadi prioritas karena berperan penting dalam memperkuat kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas sosial-

politik. Sebuah negara yang ekonominya kuat mampu memberikan dukungan finansial untuk melaksanakan kebijakan strategis, termasuk keamanan nasional, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pada hakikatnya, keamanan nasional Indonesia sendiri merupakan suatu rasa aman dan damai dari bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepentingan untuk mempertahankan keamanan nasional Indonesia merupakan keberhasilan segala daya dan upaya untuk menjaga dan memelihara rasa aman serta damai bangsa Indonesia.

Strategi nasional sering kali mencakup langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, seperti:

1. Pengembangan Infrastruktur

Infrastruktur yang baik merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks strategi nasional, pengembangan infrastruktur mencakup pembangunan jaringan transportasi (jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara), energi (pembangkit listrik, jaringan distribusi gas, pipa minyak), dan telekomunikasi (jaringan internet, telepon, dan televisi). Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, mempercepat distribusi barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi seperti industri, perdagangan, dan pariwisata.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Investasi dalam sumber daya manusia adalah langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja suatu negara. Dalam strategi nasional, hal ini mencakup pendidikan yang berkualitas, pelatihan kerja, dan pengembangan keterampilan. Program-program ini dapat membantu meningkatkan produktivitas tenaga kerja, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing ekonomi. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas juga memberikan fondasi yang kuat untuk inovasi dan pengembangan teknologi.

3. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi, penting untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki potensi pertumbuhan dan keunggulan kompetitif. Strategi nasional dapat melibatkan promosi dan dukungan khusus untuk sektor-sektor ini melalui insentif fiskal, subsidi, dan program pengembangan. Misalnya, sektor manufaktur, teknologi informasi, pertanian modern, pariwisata, dan energi terbarukan adalah beberapa contoh sektor-sektor yang sering mendapat perhatian khusus dalam strategi nasional.

4. Pengelolaan Keuangan dan Fiskal

Pengelolaan keuangan dan fiskal yang baik adalah aspek krusial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Dalam konteks strategi nasional, hal ini mencakup pengelolaan anggaran yang bijaksana, pengendalian inflasi, dan pembayaran pajak yang efektif. Negara perlu menghindari defisit anggaran yang berlebihan dan memperhatikan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan. Kebijakan fiskal yang stabil dan transparan menciptakan kepercayaan investor, menjaga stabilitas mata uang, dan memberikan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Suatu negara dapat meningkatkan daya saing, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan dengan memasukkan kebijakan-kebijakan ini ke dalam rencana nasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan dan strategi nasional yang terintegrasi - antara kebijakan dan strategi keamanan nasional, kebijakan dan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dan strategi kesejahteraan nasional - diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan nasional Indonesia.

Kesejahteraan ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan nasional yang

terjamin dapat memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kebijakan dengan strategi ekonomi nasional, strategi keamanan nasional, dan rencana kesejahteraan nasional semuanya termasuk dalam strategi nasional yang terintegrasi. Semua aspek masyarakat harus mendukung implementasi ini, dan kementerian serta lembaga lain yang menangani ekonomi dan kesejahteraan nasional harus berperan aktif. Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana strategi dan kebijakan keamanan nasional diimplementasikan dalam perekonomian:

- A. Membangun sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar yang adil dan persaingan yang sehat, menjamin kesempatan yang sama dalam bisnis dan tempat kerja, melindungi hak-hak konsumen, dan memperlakukan semua orang secara adil. Sistem ini juga harus mempertimbangkan kepentingan sosial, pertumbuhan ekonomi, nilai-nilai keadilan, kualitas hidup, dan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.
- B. Menumbuhkan persaingan yang adil dan sehat serta mengawasi monopoli dan pengaturan pasar lainnya yang merugikan masyarakat umum.
- C. Meningkatkan kemampuan pemerintah untuk memperbaiki kerusakan pasar dengan menghilangkan hambatan terhadap mekanisme pasar melalui peraturan yang diamanatkan secara hukum dan transparan, pelayanan publik, subsidi, dan insentif.

Keamanan dan ekonomi memiliki hubungan yang kuat dan timbal balik. Pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan tingkat kejahatan akan menurun dalam ekonomi yang berkembang, dan sebaliknya. Para pelaku ekonomi, termasuk investor, pengusaha, dan lainnya, dapat beroperasi dengan percaya diri dalam lingkungan yang aman dan kondusif, yang berdampak pada kegiatan ekonomi juga.

Menurut Tito, perkiraan PricewaterhouseCoopers mengindikasikan bahwa PDB Indonesia dapat mencapai peringkat kelima pada tahun 2045. Jumlah penduduk yang besar, sumber daya yang melimpah, dan wilayah yang luas merupakan fondasi dari potensi Indonesia. Namun, untuk mempertahankan hal tersebut, diperlukan stabilitas politik, kemajuan ekonomi, dan keamanan regional. Di sinilah Polri berperan untuk membantu perekonomian kita.

“Mulai dari mengidentifikasi dan menyelesaikan konflik sosial hingga menangani kasus-kasus tradisional seperti pemerasan.” Kami bahkan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus-kasus seperti ini, termasuk untuk mengusut kasus pemerasan, mengawasi dana desa, dan menangani kartel pangan yang memanipulasi harga pasar. Oleh karena itu, saya cukup optimis bahwa ekonomi kita dan negara kita secara umum memiliki potensi untuk berkembang dan maju. (UMY, 2018)

Kemampuan bangsa Indonesia untuk membangun kekuatan nasional dengan menghadapi dan menaklukkan segala rintangan, bahaya, dan gangguan yang mengancam keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa baik dari dalam maupun dari luar dikenal dengan istilah ketahanan nasional. Ketahanan nasional perlu ditingkatkan. Pembangunan tidak akan efektif jika ketahanan suatu negara rapuh dan pada akhirnya menjadi tidak berharga.

Pemerintah dan komunitas bisnis harus memperkuat kerangka ekonomi negara dengan membangun infrastruktur, mempromosikan investasi, dan memperkuat sektor pengolahan yang berorientasi ekspor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan berkelanjutan. “Kebiasaan” menjual atau mengeksport bahan mentah atau bahan baku harus dihentikan oleh komunitas bisnis. Pelaku usaha dalam negeri dituntut untuk mengubah sumber daya mentah menjadi produk akhir yang bernilai tinggi. Sektor ini juga harus mampu menghasilkan produk modal.

Mengingat UMKM mempekerjakan 97% dari seluruh pelaku usaha dan merupakan 99,99% dari seluruh pelaku usaha, pemerintah juga harus mendukung ekspansi dan modernisasi UMKM. Selain itu, diperlukan pengurangan impor barang modal dan bahan baku dalam jumlah besar. Langkah ini sangat penting karena dapat menjaga stabilitas rupiah,

memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan meningkatkan industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada pihak luar dan pengeluaran devisa. (Sasongko, 2020)

Kesejahteraan Ekonomi sangat penting hingga memiliki hak dan kewajiban bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam UUD 1945 Pasal 28 H ayat (3) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mendukung pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, kemudian Pasal 34 ayat (2) UUD Tahun 1945 menyebutkan “ Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan kemanusiaan kemanusiaan. Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara”.

Tugas dan tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Membantu meningkatkan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah yang kurang mampu atau berpenghasilan rendah.
2. Bagi mereka yang tidak mampu membayar, negara menyediakan kesejahteraan mereka.
3. Menawarkan fasilitas dan layanan publik yang terhormat kepada warga negara.
4. Memberikan pekerjaan yang terhormat kepada masyarakat.

Dalam hal ekonomi nasional dan kesejahteraan penduduk, warga negara memiliki hak dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memperoleh kehidupan yang terhormat.
2. Sebagai manusia yang terhormat, mendapatkan jaminan dan perlindungan dari pemerintah.
3. Menggunakan fasilitas dan layanan sosial yang disediakan negara untuk menjalani kehidupan yang terhormat dan bermartabat.
4. Mencari pekerjaan yang layak. (MKRI, 2015)

Hak adalah kemampuan untuk mendapatkan sesuatu yang secara hukum jatuh tempo, dapat ditegakkan melalui paksaan, dan tidak dapat diambil dari atau diwakili oleh pihak lain. Beban yang harus dilaksanakan atau ditugaskan, yang dapat dipaksakan, dan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dikenal sebagai kewajiban. Karena kewajiban dan hak tidak dapat dipisahkan, maka memenuhi kewajiban merupakan prasyarat untuk mendapatkan hak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban warga negara, di bidang keamanan dan pertahanan adalah salah satunya.

Kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga negara di bidang keamanan dan pertahanan, antara lain

1. UUD 1945 pasal 27 ayat (3) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."
2. UUD 1945 pasal 30 ayat (1) yang berbunyi "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".
3. UU RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
 - Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara"
 - Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi "Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - A. Pendidikan kewarganegaraan;
 - B. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;

- C. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
- D. Pengabdian sesuai dengan profesi. (Pakpahan, 2018)

Setiap pasal dalam undang-undang tersebut memiliki makna yang hampir sama dan saling melengkapi. Sebagai warga negara Indonesia yang bertanggung jawab, setiap orang harus memenuhi kewajibannya untuk melindungi keamanan negara dengan caranya masing-masing, yang dapat dilakukan dengan menjadi anggota TNI atau sesuai dengan bidang pekerjaannya. Setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk melindungi keamanan negara. Warga negara akan memiliki hak untuk hidup dengan aman dan damai jika setiap orang memenuhi tanggung jawabnya dengan penuh tanggung jawab.

KESIMPULAN

Dalam rangka menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, pertahanan negara dikelola dalam suatu sistem pertahanan negara yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya. Sistem pertahanan negara juga direncanakan jauh-jauh hari oleh pemerintah dan diselenggarakan secara menyeluruh, terpadu, terarah, dan berlanjut.

Kesejahteraan ekonomi Indonesia mencakup aspek kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitar, serta memperkuat wilayah perbatasan sebagai beranda depan negara yang berorientasi pada aspek kesejahteraan dan keamanan. Pengembangan wilayah perbatasan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat keamanan wilayah perbatasan. Kesejahteraan ekonomi dalam konteks strategi nasional merujuk pada kemakmuran ekonomi suatu negara sebagai salah satu pilar utama dalam mencapai tujuan strategis nasional. Ini mencakup berbagai aspek ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang adil, stabilitas harga, dan keberlanjutan lingkungan.

Kesejahteraan ekonomi yang meningkat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga memperkuat keamanan nasional. Sebaliknya, keamanan nasional yang terjamin dapat memungkinkan pengembangan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Strategi nasional yang terpadu mencakup kebijakan dengan strategi keamanan nasional, kebijakan dengan strategi ekonomi nasional, serta kebijakan dengan strategi kesejahteraan nasional.

Pemerintah dan para pelaku usaha harus memperkuat kerangka ekonomi negara dengan membangun infrastruktur, mendorong investasi, dan memperkuat sektor pengolahan yang berorientasi ekspor untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan stabil.

Mengingat bahwa UMKM menyumbang 97% dari seluruh pelaku usaha dan 99,99% dari seluruh pelaku usaha, pemerintah juga harus mendukung para pelaku UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang. Selain itu, diperlukan pengurangan impor barang modal dan bahan baku dalam jumlah besar.

Setiap orang harus diberi kesempatan yang sama untuk melindungi keamanan negara. Setiap warga negara akan diberikan hak untuk hidup dengan aman dan harmonis jika mereka memenuhi tanggung jawab mereka dengan penuh tanggung jawab.

Situasi keamanan nasional diperlukan untuk kepentingan nasional. Keamanan nasional Indonesia pada hakikatnya adalah rasa aman dan tenteram yang dinikmati oleh rakyat Indonesia di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberhasilan semua inisiatif yang bertujuan untuk menjaga keselamatan dan ketenangan rakyat Indonesia dipertaruhkan dalam menjaga keamanan nasional Indonesia Dalam kerangka rencana nasional suatu negara, pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional sangat penting. Ekonomi yang kuat dan berkembang dapat meningkatkan standar hidup dan meningkatkan kedudukan suatu negara di dunia internasional. Sementara itu, stabilitas, perlindungan dari ancaman eksternal, dan

pemeliharaan operasi negara semuanya disediakan oleh keamanan nasional yang kuat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, kebijakan nasional harus menyeimbangkan kedua faktor tersebut. Oleh karena itu, kebijakan dengan strategi nasional yang terintegrasi - yaitu, kebijakan dengan strategi keamanan nasional, strategi ekonomi nasional, dan strategi kesejahteraan nasional - diperlukan untuk menjamin realisasi tujuan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chotimah, H. C. (2017). Perkembangan Aspek Keamanan Ekonomi dalam Konsep Human Security. *Jurnal Transformasi Global*, 4(1).
- Dedy Sasongko. (2020). "Strategi Membangun Indonesia Maju." KEMENKEU. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13347/Strategi-Membangun-Indonesia-Maju.html>
- Filah, N. (2020). Hak dan kewajiban warga negara.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kuantitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- KEMENKEU. (2008). "KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA" <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/7TAHUN2008PERPRESLamp.htm>
- MKRI. (2015). "Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan UUD 1945." <https://www.mkri.id/index.php?id=11732&page=web.Berita>
- Pakpahan, R. H., & Sihombing, E. N. (2018). Tanggung Jawab Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Responsibility State In The Implementation Of Sosial Security. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(2), 163-174.
- Prasetyaningtyas, P. (2017). *Identifikasi Kesejahteraan Ekonomi Pekerja Olahan Ikan Tuna Berdasarkan Pengeluaran Pendapatan Di Kecamatan Pacitan* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrin, M. A., Arifin, M., & Luayyin, R. H. (2022). Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Syariah. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 1(2), 95-105. <https://doi.org/10.46773/v1i2.395>
- UMY. (2018) "Menkeu & Kapolri: Ekonomi dan Keamanan Kunci Penting Kemajuan Indonesia." <https://www.umi.ac.id/menkeu-kapolri-ekonomi-dan-keamanan-kunci-penting-kemajuan-indonesia>